



LAPORAN KINERJA 2023



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUKABUMI**



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS SOSIAL

**Kompleks Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. /Fax (0266) 245996/245997
SUKABUMI**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama satu tahun anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 68 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, bahwa secara kelembagaan SOTK Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Sosial.

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) ini dapat menjadi pedoman dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan dan penetapan kebijakan program kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya.

Sukabumi 30 Januari 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sukabumi



WAWAN IG DAWAN SARUTRA, S.IP., M.A.P

Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 196807201990061001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Dinas Sosial kepada publik sebagai pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Sosial.

Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dinas yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang. Pencapaian sasaran strategis dalam Tahun 2023, walaupun belum seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal, namun secara umum telah berhasil mewujudkan keseluruhan sasaran strategis yang ditetapkan.

Keberhasilan ini secara langsung maupun tidak langsung telah mendongkrak tingkat capaian pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2023. Pencapaian sasaran strategis sampai dengan Tahun 2023 dari Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dapat digambarkan sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2023		% Realisasi
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	%	18.91	7.90	41.78

2	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani.	%	15.67	0.63	4.02
3	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial	%	18.29	13.99	76.49
4	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	16.81	15.41	91.67
5	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	%	100	100	100
6	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana	%	16.68	3.55	20.08
7	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola	%	100	100	100

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	I
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4 Dasar Hukum	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	35
3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023	41
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	45
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah / Renstra PD	48
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional	51
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Dilakukan	63
3.1.6. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan.....	64
3.2 Realisasi Anggaran	74
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Simpulan	78
4.2 Saran	79
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi tidak semata bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melainkan juga mengarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan demokratis yang dilandasi nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Prinsip *Clean Government* dan *Good Governance* dalam reformasi birokrasi merupakan dua hal penting yang menjadi landasan dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Diharapkan hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tentunya dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 68 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Maka kedudukan Dinas ini adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Adapun yang menjadi tugas pokok dinas sosial yaitu melaksanakan urusan pemerintah diantaranya :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- 2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan dinas;
- 3) Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di kesekretariatan; bidang perlindungan dan jaminan sosial; bidang rehabilitasi sosial; bidang pemberdayaan sosial; kelompok jabatan fungsional; dan unit organisasi lainnya di lingkungan dinas;

- 4) Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
- 5) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- 9) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja menggunakan pendekatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) dimaksudkan untuk menyampaikan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan tujuan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 adalah :

- a) Sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran tahun 2023;
- b) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- c) Sebagai evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh DPA Tahun 2023;
- d) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

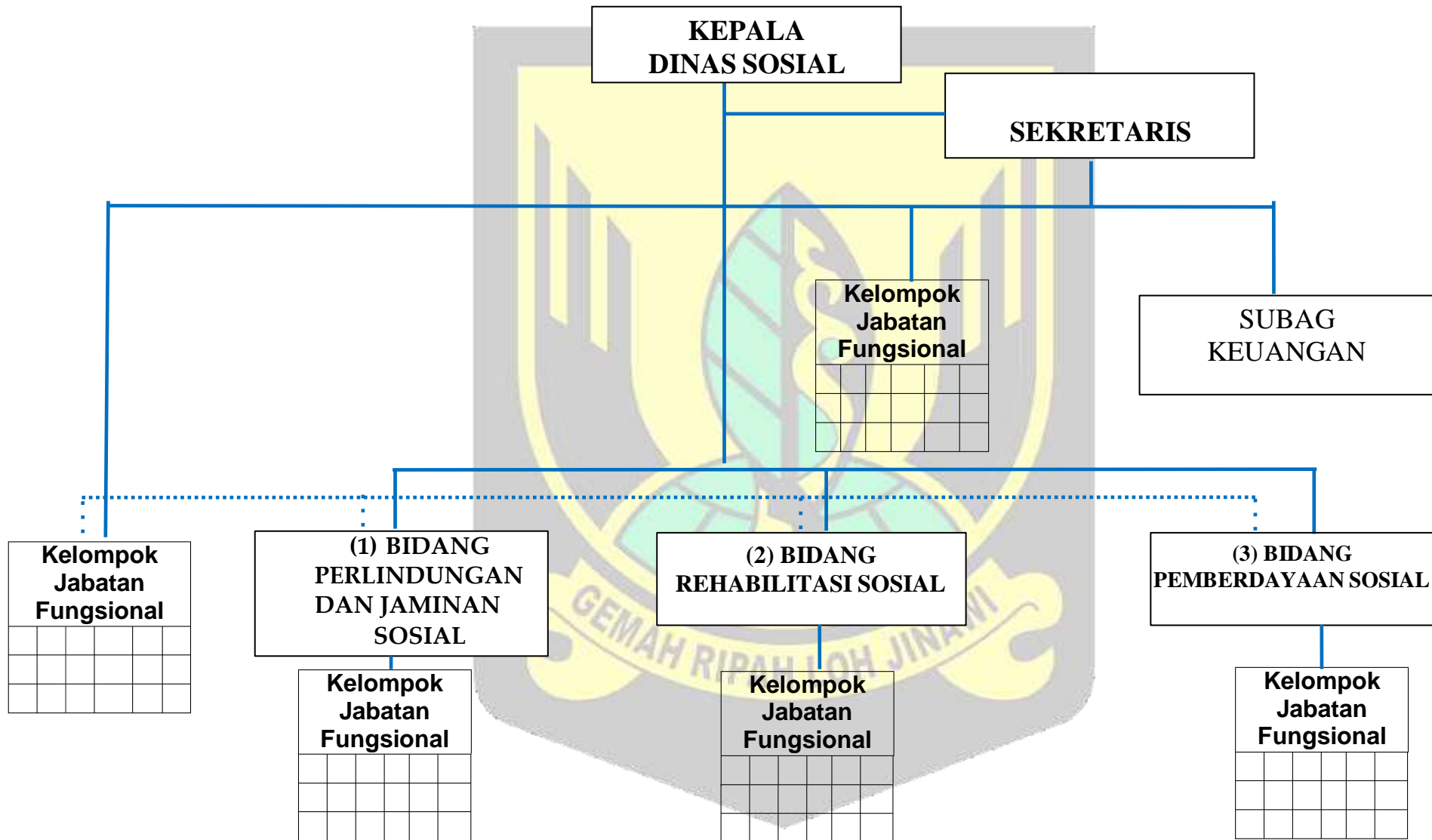
Sesuai dengan dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 68 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat membawahkan:
 - Sub Koordinator dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
- 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. membawahkan:
 - Sub koordinator Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin;
 - Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
 - Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana.
- 4) Bidang Rehabilitasi dan Pembinaan Sosial. membawahkan :
 - Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar Luar Panti
 - Sub Koordinator Layanan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti
 - Sub Koordinator Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya Luar Panti dan Penanganan Warga Negara Migran Bermasalah
- 5) Bidang Pemberdayaan Sosial. membawahkan:
 - Sub Koordinator Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosialub Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat
 - Sub Koordinator Sumbangan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan

6) Kelompok Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI (Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021)



Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi
Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Kepala Bidang	
	a. Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial	1 orang
	b. Bidang Rehabilitasi Sosial	1 orang
	c. Bidang Pemberdayaan Sosial	1 orang
4.	Kepala Sub Bagian	1 orang
5.	Sub Koordinator	10 orang
5.	Staf / Pelaksana	
	a. Staf Gol. IV	- orang
	b. Staf Gol. III	9 orang
	c. Staf Gol. II	- orang
	d. Staf Gol. I	1 orang
	e. Staf Non-PNS	27 orang
	Jumlah	53 orang

Sumber : Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

1.4 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 mengacu pada :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Peresiden Nomor 28 Tahun 2014 Tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja. pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja intansi pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 68 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi bahwa Dinas Sosial;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Ditetapkannya Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perangkat daerah harus menyesuaikan dokumen perencanaan terhadap keselarasan dokumen dengan penetapan yang lebih tinggi. Sesuai dengan Misi dan Visi Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi menyelaraskannya sehingga tujuan dan sasaran beserta indikatornya.

Visi Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”, dengan Misi sebagai berikut:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;
- 2) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah; dan
- 4) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, dan Akuntabel.

Adapun tujuan dan alat ukur dari setiap misinya adalah sebagai:

- a. Misi Kesatu memiliki tujuan terwujudnya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dalam lingkungan yang religius. Alat ukur untuk hal ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Misi kedua dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan. Tolok ukur dari misi kedua dan tujuan ini adalah Presentase pertumbuhan PDRB.
- c. Misi ketiga menghendaki tujuan meningkatnya pertumbuhan infrastruktur daerah yang berkualitas. Ketentuan yang menjadi dasar haluan misi ketiga adalah indeks kepuasan layanan infrastruktur.
- d. Misi keempat mempunyai tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan inovatif, profesional dan akuntabel. Kriteria terlaksananya misi keempat ini didasarkan Indeks RB (Reformasi Birokrasi).

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi maka fungsi dan tugas Dinas Sosial terkait erat dengan pencapaian misi kesatu, yaitu “terwujudnya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dalam lingkungan yang religius dengan alat ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”. Sisi penting lainnya, yakni arah kebijakan RPJP lingkup bidang pembangunan manusia dan masyarakat. Secara khusus inovasi berkelanjutan dari Bidang Sosial terdiri atas dua arah, yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat; dan
- (2) Peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Sukabumi
Periode Tahun 2021-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	15,94	18,92
			Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	15,67	15,67
			Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial	18,29	18,29
			Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	17,07	16,81
			persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	100,00	100,00
			Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan	16,73	16,73

			kesiapsiagaan bencana		
			Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100,00	100,00

Langkah strategis yang telah ditetapkan melalui penjabaran Visi Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi yang menjadi kebijakan pembangun daerah mengacu pada target dan indikator kinerja sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 memiliki Visi yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin** .Dan Misi terdiri dari;

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berbudaya Dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis Dan Pariwisata Berkelanjutan
3. Meningkatkan Konektivitas Untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Inovatif, Profesional Dan Akuntabel

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan. Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tujuan

Meningkatnya Penanganan PPKS

Indikatornya :

1. Persentase PPKS yang tertangani;
2. Persentase PSKS yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

2.1.2 Sasaran

Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS) :

1. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial;
2. Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani;
3. Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial;
4. Persentase (%) Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial;
5. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten;
6. Persentase (%) Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana;
7. Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola.

Pencapaian tujuan dan sasaran ditunjang oleh program prioritas Dinas Sosial yaitu sebagai berikut :

a. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- Isu Strategis

Sangat tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus ditangani khususnya komunitas adat, masih rendahnya penggalan dan pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menunjang pemberdayaan, rehabilitasi dan jaminan dan perlindungan sosial terhadap PMKS yang ada di Kabupaten Sukabumi.

- Latar Belakang

Tujuan dari program ini untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan sosial dan kualitas hidup keluarga Komunitas Adat, serta menggali dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan bagi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Dengan adanya PSKS dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di kabupaten Sukabumi akan dapat lebih mudah, terarah dan

berkesinambungan sehingga jumlah PMKS yang ada akan semakin menurun.

- Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)
Perlu adanya peningkatan dan fokus pemberdayaan Komunitas Adat baik dari pemerintah maupun swasta dan perlu adanya program kegiatan yang memberdayakan PSKS

b. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

- Isu Strategis
Jumlah angka WNI-Migran, Korban perdagangan orang dan Korban Tindak Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi sangat riskan dan membutuhkan perhatian khusus untuk ditindak lanjuti
- Latar Belakang
Terlindunginya hak-hak penyandang disabilitas dan WNI-Migran, Korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan untuk hidup secara wajar dan perhatian yang khusus
- Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)
Perlu adanya peningkatan dari semua pihak tanpa terkecuali dari pemerintah dan swasta terhadap penanganan permasalahan sosial terutama WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan.

c. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- Isu Strategis
Masih tingginya Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti yang belum tertangani/terehabilitasi;
- Latar Belakang
Program ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan dan tanggung jawab serta peran aktif masyarakat

dalam menangani permasalahan sosial dilingkungannya terutama Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti

- Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)
Perlu adanya peningkatan dari semua pihak tanpa terkecuali dari pemerintah terhadap penanganan permasalahan social terutama Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis dan PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti

d. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- Isu Strategis
Tingginya Jumlah keluarga sangat miskin yang terdata yang memerlukan perhatian yang sangat fokus dari berbagai program pemerintah, dan membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial demi layaknya kehidupan yang adil, merata dan sejahtera serta mudahnya mengakses pelayanan dan rujukan yang terpadu.
- Latar Belakang
 - a. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dalam ini masyarakat akan dengan mudah mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. Mendorong optimalnya pelayanan program perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
 - c. Menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat akan hak-hak dalam perlindungan dan jaminan sosial yang ada.
- Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)
Perlindungan dan jaminan sosial akan memberikan layanan dan jaminan bagi masyarakat miskin baik kategori sangat miskin maupun rentan miskin untuk mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial. Masyarakat miskin adalah

tanggungjawab bersama dalam memberikan penghidupan dan kehidupan yang layak tanpa terkecuali.

e. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- Isu Strategis
Secara Geografis Kabupaten Sukabumi yang mempunyai gunung dan lautan dan curah hujan yang sangat tinggi membuat Kabupaten Sukabumi rentan terhadap bencana, seperti longsor, gempa bumi dan lainnya.
- Latar Belakang
Tingginya kejadian Bencana Alam dikabupaten Sukabumi maka diperlukan program dalam hal penanganan pada saat dan setelah bencana terjadi, serta bertambahnya pengetahuan akan tindakan yang perlu dilakukan pada saat dan sebelum bencana terjadi
- Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)
Perlu adanya peningkatan layanan kedaruratan pada saat dan setelah bencana dan pengetahuan yang baik dan benar dalam penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana

f. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- Isu Strategis
semakin menurunnya pelestarian dan penghargaan terhadap unsur keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
- Latar Belakang
dan penghargaan terhadap unsur keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
- Rasional (Inovasi Kreatif-Uraian Singkat Urgensi Program)
penghargaan terhadap unsur keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial sehingga akan terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk, veteran.

Tabel 2.2
Target Kinerja Berdasarkan RPJMD / RENSTRA PD 2021 – 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Penanganan PPKS	1. Persentase PPKS yang tertangani; 2. Persentase PSKS yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	%	8,67	15,94	18,91	18,91	18,91	18,67
			Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	%	21,63	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
			Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial	%	8,55	18,29	18,29	18,29	18,29	18,29
			Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	17,30	17,07	16,81	16,54	16,27	16,01
			persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat	%	16,55	16,73	16,68	16,68	16,68	16,68

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana							
			Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Adapun rumusan strategi dan kebijakan tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial - Kabupaten Sukabumi
Periode Tahun 2021-2026**

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin			
MISI Kedua : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Grobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) luar panti	Peningkatan Keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan
		Pengembangan Rehabilitasi sosial Luar Panti	Penguatan dan penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar Bimbingan / pendampingan rehabilitasi sosial sebagai fokus layanan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

MISI Kedua : Meningkatkan Produktivitas dan Daya saing Ekonomi Berbasis Gribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Percepatan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial sesuai standar	Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
		Peningkatan peran serta lingkungan dan masyarakat terhadap penanganan PPKS	Peningkatan kapasitas SDM Kesejahteraan sosial / PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Integrasi pelaksanaan dan penyaluran bantuan sosial pangan dan bantuan sosial lainnya	Peningkatan Kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
		Penguatan skema pendampingan dan monitoring	
		Peningkatan kualitas pendamping untuk fasilitasi ke wirausahaan atau bursa kerja serta menghubungkan dengan mitra usaha strategis	Peningkatan Kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
		Penguatan skema dan pendataan graduasi program bantuan sosial	
		Peningkatan kuantitas pendamping bagi kelompok usaha bersama	
		Penguatan jejaring kerja dan kolaborasi usaha, diantaranya dengan penambahan modal usaha melalui pembiayaan KUKM	
		Penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosia	

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin			
MISI Kedua : Meningkatkan Produktivitas dan Daya saing Ekonomi Berbasis Gribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kapasitas yang memadai dan sistematis berbasis kompetensi, melalui pengembangan kompetensi dasar yang mencakup keterampilan komunikasi, manajerial, fasilitasi dan advokasi	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosia
		Perluasan peran dan insentif memadai bagi SDM kesejahteraan sosial melalui penguatan peran sebagai fasilitator, mediator	
		Peningkatan sertifikasi SDM kesejahteraan Sosial dan akreditasi LKS	

Setelah ditetapkan strategi dan arah kebijakan, kemudian ditetapkan indikator kinerja utama perangkat daerah atau disebut dengan IKU PD. Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Adapun yang menjadi indikator kinerja utama dinas sosial setelah perubahan adalah :

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI

1. Nama Organisasi : **DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI**
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.
3. Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- c) Pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di kesekretariatan, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, kelompok jabatan fungsional, dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;
- d) Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
- e) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- i) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI
2021-2026 PERUBAHAN

No .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang Seharusnya Mendapatkan Pemberdayaan Sosial}} \times 100$	Dinas Sosial
2	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi	%	$= \frac{\text{Jumlah PMKS yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang}} \times 100$	Dinas Sosial

No .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
		Sosialnya		Seharusnya Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	
3	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Layanan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang Terdaftar dalam Akses Layanan Jaminan Sosial}} \times 100$	Dinas Sosial
4	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Layanan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang Terdaftar dalam Layanan Jaminan Sosial}} \times 100$	Dinas Sosial
5	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah PSKS Perorangan yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial}}{\text{Jumlah PSKS Perorangan Terdaftar}} \times 100$	Dinas Sosial

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA
6	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	$= \frac{\text{Jumlah Lembaga PSKS yang Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial}}{\text{Jumlah Lembaga PSKS Terdaftar}} \times 100$	Dinas Sosial

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah janji pimpinan PD yang akan dicapai selama satu tahun yang merupakan penjabaran pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA PD dengan target-target yang ditentukan dan harus dicapai selama satu tahun. Adapun pernyataan perjanjian kinerja kepala dinas sosial dalam mewujudkan target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %
2	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)
	Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS) Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	
3	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %
4	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100 %
5	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100 %
6	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %
7	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	6,38 %
8	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani.	4,70 %
9	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial	10,68 %
10	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi	15,68 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)
	Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	
11	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	100,00 %
12	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana	2,78 %
13	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100,00 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 5.546.704.627	
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.160.500.000	
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 6.500.000	
4.	Program Rehabilitas Sosial	Rp. 2.220.500.000	
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.979.300.000	
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 684.000.000	
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.100.000.000	

Perjanjian Kinerja perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKABUMI**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %
2	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %
3	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 %
4	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100 %
5	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100 %
6	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	6,38%
8	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani.	4,70 %
9	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial	23,00 %
10	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	15.74 %
11	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	100 %
12	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana	2,76 %
13	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	(1)	(2)	(3)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 5.679.141.555	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	(1)	(2)	(3)
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.260.500.000	
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 6.500.000	
4.	Program Rehabilitas Sosial	Rp. 2.659.448.000	
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2.079.300.000	
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 865.000.000	
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 100.000.000	

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja perubahan 2023. jumlah sasaran yang dilaksanakan sebanyak 1 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja. Sasaran program rutin sebanyak 7 sasaran. Keselarasan Tujuan dan Sasaran strategis yang merupakan IKU Daerah terhadap IKU Dinas Sosial disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Keselarasn Tujuan dan Sasaran Daerah
Terhadap IKU Dinas Sosial

Misi : MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING EKONOMI BERBASIS AGROBISNIS DAN PARIWISATA BERKELANJUTAN;					
IKU Pemerintah Daerah			IKU Dinas Sosial		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Mewujudkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial; Persentase

<p>sejak dini dalam lingkungan yang religius (T2)</p> <p>Indikator : <i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</i></p>			<p>Mandiri dan Sejahtera</p> <p>Indikator : <i>Persentase PMKS yang tertangani;</i></p>	<p>PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial dan Dapat Menjalankan Fungsi Sosialnya;</p> <p>Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial;</p> <p>Persentase Masyarakat Miskin dan Korban Bencana Alam yang Mendapatkan</p> <p>Persentase PSKS Perorangan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>Persentase PSKS Kelembagaan yang Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p>
---	--	--	---	---

Adapun anggaran kegiatan perindikator kinerja yang menunjang pencapaian perjanjian kinerja dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Alokasi Anggaran Perubahan Per-Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju Dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin							
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Anggaran Rp.
			Satuan	Target Per Tahun	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Tersedia nya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Akuntabel	1. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.196.000
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000
						"Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	5.000.000

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju Dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Anggaran Rp.
			Satuan	Target Per Tahun	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Tersedia nya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	2. Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan Keuangan Perangkat Daerah	%		Administrasi Keuangan	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.919.490.355	
Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD						5.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju Dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Anggaran Rp.
			Satuan	Target Per Tahun	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik	3 Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%		Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000
						Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5.000.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	25.000.000
					4 Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	2.400.000

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju Dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Anggaran Rp.
			Satuan	Target Per Tahun	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik	5. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor"	6.250.000
	5. Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	110.000.000			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.276.400				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000				
			5.000.000				

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju Dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Anggaran Rp.
			Satuan	Target Per Tahun	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	6. Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik	6. Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	Pentausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	162.250.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik"						827.578.800	
		7. Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.600.000
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju Dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Anggaran Rp.
			Satuan	Target Per Tahun	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.550.000
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.550.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.450.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perubahan tahun tahun 2023, maka perlu adanya rencana aksi pencapaian target kinerja yang akan dicapai setiap triwulan. Adapun rencana aksi pencapaian target kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi adalah sebagaimana diuraikan *lampiran rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2023*.

Persentase anggaran per indikator sasaran disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.9
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

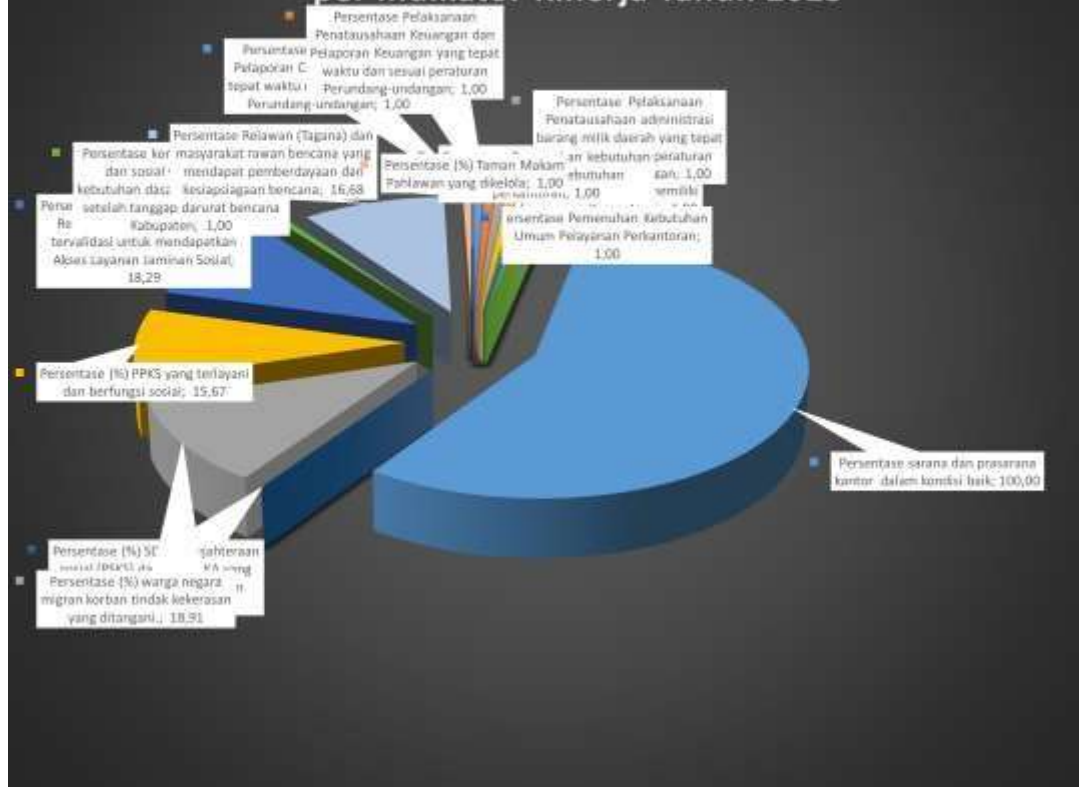
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	52.2196.000	
2	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	3.934.490.355	
3	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	30.000.000	
4	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	2.400.000	

5	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	233.526.400	
6	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	989.828.800	
7	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	436.700.000	
8	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	1.260.500.000	
9	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani.	6.500.000	
10	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial	2.659.448.000	

	Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS			
11	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	2.079.300.000	
12	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	317.000.000	
13	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS	Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana	548.000.000	
14	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS	Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100.000.000	

Jika ditampilkan dalam grafik adalah sebagai berikut :

Grafik Anggaran Pembangunan per Indikator Kinerja Tahun 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja terhadap target RPJMD 2021-2026. Pengolahan data capaian kinerja berdasarkan realisasi yang didukung oleh anggaran yang masuk dalam DPA perangkat daerah dan capaian kinerja sasaran kegiatan penanganan yang dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

sasaran strategis Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS) dengan 14 (Empat Belas) indikator kinerja terdiri 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Penunjang Pelayanan Publik dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS) mencapai realisasi dibawah capaian realisasi digambarkan dengan grafik sebagai berikut :

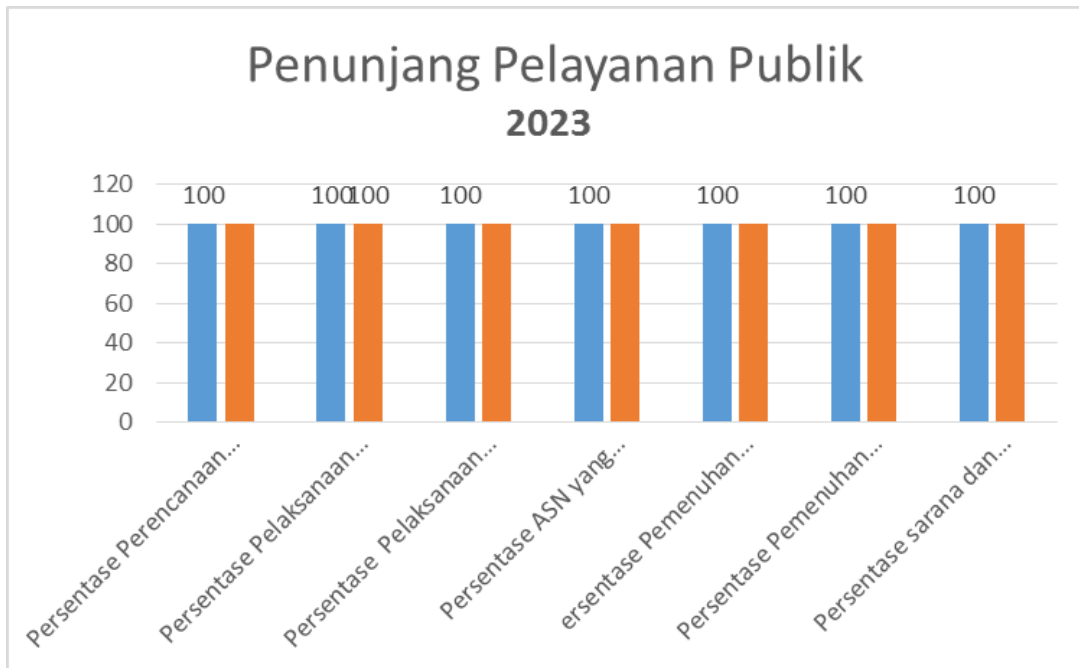
Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

A. Penunjang Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2021	
				Target (Renstra)	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100
2	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan	%	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2021	
				Target (Renstra)	Realisasi
1	2	3	4	5	6
		Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan			
3	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	%	100	100
4	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	%	100	100
5	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	%	100	100
6	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	%	100	100
7	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	100	100

Jika ditampilkan dalam grafik adalah sebagai berikut :



B. Pelayanan PPKS/PMKS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2021	
				Target (Renstr a)	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	%	15,94	7,90
2	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani.	%	15,67	0,63
3	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial	%	18,29	13,99

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2021	
				Target (Renstra)	Realisasi
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	17,07	15,41
5	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	%	100	100,0
6	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana	%	16,73	3,35
7	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola	%	100	100,0

Jika dilihat dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa dari



Dari tabel dan grafik di atas dapat diuraikan bahwa Sasaran **Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)** adalah sebagai berikut :

- a. Indikator *Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial* dengan target indikator ini sebanyak 18,91% (1.103 orang) terealisasi sebanyak 7,90% (461 orang). Pencapaian target terhadap realisasi tahun 2023 dapat disajikan dalam grafik di bawah ini :



- b. Indikator *Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani.*” dengan target indikator ini sebanyak 15,67% (50 orang) terealisasi sebanyak 0,63% (2 orang) atau Pencapaian target terhadap realisasi tahun 2023 dapat disajikan dalam grafik di bawah ini :



- c. Indikator *“Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial”* dengan target indikator ini sebanyak 18,29% (7.185 orang) terealisasi sebanyak 13,99% (5.497 orang). Pencapaian target terhadap realisasi tahun 2023 dapat disajikan dalam grafik di bawah ini :



- d. Indikator *“Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial”* dengan target indikator ini sebanyak 16,81% (630.289 orang) terealisasi sebanyak 15,41% (577.935 orang) Pencapaian target terhadap realisasi tahun 2023 dapat disajikan dalam grafik di bawah ini :



- e. Indikator *“Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten”* dengan target indikator ini sebanyak 100 % (2.289 orang) terealisasi sebanyak 100% (2.289 orang) Pencapaian

target terhadap realisasi tahun 2023 dapat disajikan dalam grafik di bawah ini :



f. Indikator “*Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana*” dengan target indikator ini sebanyak 16,68% (1.815 Orang) terealisasi sebanyak 3,35% (365 Orang). Pencapaian target terhadap realisasi tahun 2023 dapat disajikan dalam grafik di bawah ini :



g. Indikator “*Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola*” dengan target indikator ini sebanyak 100 % (1 orang) terealisasi sebanyak 100% (1 orang). Pencapaian

target terhadap realisasi tahun 2023 dapat disajikan dalam grafik di bawah ini :



3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian target kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja			% 2020 Thd 2022
				2020	2021	2022	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	%	5,79	8,98	7,90	2,11

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja			% 2020 Thd 2022
				2020	2021	2022	
2	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani.	%	1,25	1,57	0,90	-0,62
3	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial	%	6,47	11,37	13,99	7,52
4	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	20,50	15,70	15,41	-5,09
5	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	0,00
6	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan	%	3,03	1,39	3,35	0,32

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja			% 2020 Thd 2022
				2020	2021	2022	
		bencana					
7	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola	%	100,00	100,00	100,00	0,00

Perbandingan capaian kinerja tahun tiga tahun terakhir dapat disajikan pula dalam grafik berikut :



Dari 7 indikator kinerja dapat dibandingkan bahwa capaian realisasi tahun 2023 terhadap beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator *“Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial”*. Tahun tahun 2021 sebanyak 5,79 (326 orang) Sedangkan

tahun 2022 sebanyak 8,98% (525 orang) dan Tahun 2023 sebanyak 7,90 (461 Orang) atau mengalami **Kenaikan** sebanyak 2,11% (135 orang). Grafik perbandingan dapat disajikan sebagai berikut :



2. Indikator “*Persentase (%) warga negara migran 2020 korban tindak kekerasan yang ditangani*”. Tahun 2021 sebanyak 1,25% (4 orang) sedangkan tahun dan Tahun 2022 sebanyak 1,57 % (5 Orang) sedanglam Tahun 2023 sebanyak 0,90% (2 orang) atau mengalami **Penurunan** sebanyak -0,62% (1 orang). Grafik perbandingan dapat disajikan sebagai berikut :



3. Indikator *"Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial"*. Tahun 2021 sebanyak 6,47% (2.240 orang) tahun dan tahun 2022 sebanyak 11,37 % (4.466 Orang) Sedangkan Tahun 2023 sebanyak 13,99% (5,497 orang) atau mengalami kenaikan sebanyak 7,52 % (2.235 Orang). Grafik perbandingan dapat disajikan sebagai berikut :



4. Indikator “*Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial*”. Tahun 2021 sebanyak 20,50% (768945 orang) dan Tahun 2022 sebanyak 15,70% (588.877 Orang) Sedangkan Tahun 2023 15,41% (577,935 orang) atau mengalami **Penurunan** sebanyak -5,09% (-768.367 orang). Grafik perbandingan dapat disajikan sebagai berikut :



5. Indikator " Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten". Tahun 2021 sebanyak 100% (2.802 Orang) dan Tahun 2022 sebanyak 100% (3.616 orang) sedangkan Tahun 2023 sebanyak 100% (2,287 orang) atau mengalami **Kenaikan** sebanyak 0.00% (2,800 orang). Grafik perbandingan dapat disajikan sebagai berikut :



6. Indikator "Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana". Tahun 2021 sebanyak 3,03% (330 Orang) sedangkan tahun 2021 sebanyak 1,39% (152 Orang) dan Tahun 2023 sebanyak 3,35% (365 orang) atau mengalami **Penaikan** sebanyak 0,32% (35 orang). Grafik perbandingan dapat disajikan sebagai berikut :



7. Indikator “*Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola*” Tahun 2021 sebanyak 100% (1 Orang) sedangkan tahun 2022 sebanyak 100% (1 Orang) dan Tahun 2023 sebanyak 100% (1 orang) atau tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami kenaikan dan penurunan sebanyak atau 0.00% (1 orang). Grafik perbandingan dapat disajikan sebagai berikut :



3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja S.D Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah / RESNTRA PD

Capaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Dinas Sosial dapat disajikan dalam tabel berikut :

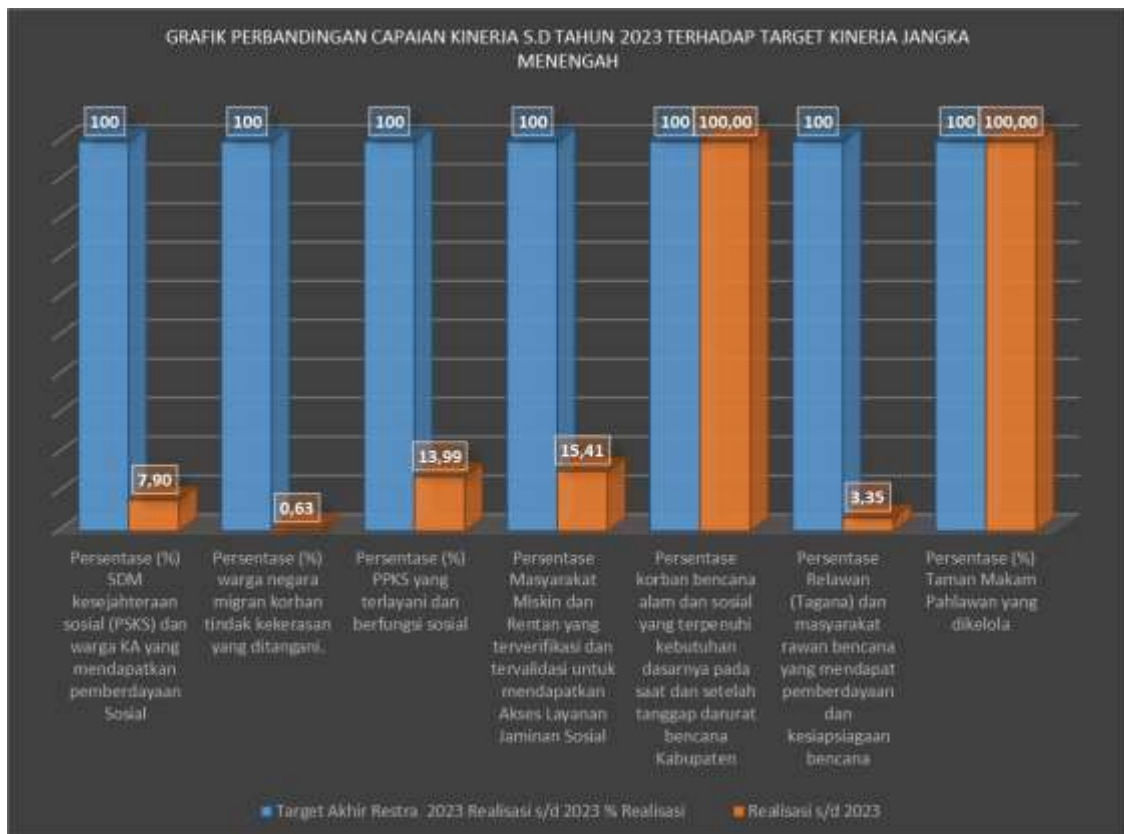
Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja S/D Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)	Realisasi s.d Tahun 2023	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	%		7,90	7,90
2	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani.	%		0,63	0,63
3	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial	%		13,99	13,99
4	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan	%		15,41	15,41

	Rentan (PPKS/PMKS)	tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial				
5	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	%		100	100
6	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana	%		3,35	3,35
7	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola	%		100	100

Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target jangka menengah dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah



Perbandingan capaian kinerja terhadap target jangka menengah dapat dijelaskan bahwa Sasaran Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS) yang memiliki 7 indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial” sampai dengan tahun 2023 capaian realisasi mencapai 7,90% (461 orang) dari target akhir sebesar 100% (5.834 orang).
2. Indikator “*Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani.*” sampai dengan tahun 2023 capaian realisasi mencapai 0,63% (2 orang) dari target akhir sebesar 100% (319 orang).
3. Indikator “*Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial*” sampai dengan tahun 2023 capaian realisasi mencapai 13,99% (5,497 orang) dari target akhir sebesar 100% (39.284 orang).

4. Indikator “*Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial*” sampai dengan tahun 2023 capaian realisasi mencapai 15,41% (577,935 orang) dari target akhir sebesar 100% (3.750.513 orang).
5. Indikator “*Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten*” sampai dengan tahun 2023 capaian realisasi mencapai 100% (2,287 orang) dari target akhir sebesar 100% (40.537 Orang).
6. Indikator “*Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana*” sampai dengan tahun 2023 capaian realisasi mencapai 3,35% (365 orang) dari target akhir sebesar 100% (10.881 orang).
7. Indikator “*Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola*” sampai dengan tahun 2023 capaian realisasi mencapai 100% (1 orang) dari target akhir sebesar 100% (1 orang), sehingga realisasi tercapai.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Standar Nasional yang digunakan dalam perbandingan capaian kinerja ini merupakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial terhadap realisasi capaian kinerja tahun 2023. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja nasional adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel di atas, Terdapat 5 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dijelaskan sebagai beriku

1. PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM (IPSPM)

Indeks pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

$$IP_{spm} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times BM) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times BP)$$

Keterangan:

IPSPM =	Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.
Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar =	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumberdaya manusia sesuai dengan standar teknis
Persentase pencapaian penerima layanan dasar =	Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini
BM =	Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20%
BP =	Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80%

2. Perhitungan Indeks pencapaian SPM (IPSPM) dinas Sosial

Tabel 3.10 Rekapitulasi Mutu Minimal Dan Penerima Layanan Dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR (MUTU)	
		JUMLAH KLAIM LUAR PANTI	POPULASI DI DAERAH KABUPATEN KOTA YANG MEMBUTUHKAN REHABSOS LUAR PANTI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	7	8
1	Penyandang Disabilitas Terlantar	595	595	100,00	100,00	76,92
2	Anak Terlantar	2635	2635	100,00	100,00	83,33
3	Lansia Terlantar	2750	2750	100,00	100,00	76,92
4	Gepeng	75	75	100,00	100,00	36,36
5	Bencana alam dan sosial	2480	2480	100,00	100,00	80,00
	Rata-rata Capain			100,00		70,71
	Indeks Pencapaian (IP) Penerima Lauanan (80%)			80,00		
	Indeks Pencapaian (IP) Mutu Layanan (20%)					14,14
	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM)			94,14		

	Kategori			Tuntas Utama		
--	----------	--	--	---------------------	--	--

$$IP_{spm} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar } \times BM) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar } \times BP)$$

$$IP_{spm} = \left(\frac{76,92 + 83,33 + 76,92 + 36,36 + 70,71}{5} \times 20\% \right) + \left(\frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100}{5} \times 80\% \right)$$

$$IP_{spm} = \left(\frac{353,54}{5} \times 20\% \right) + \left(\frac{500}{5} \times 80\% \right)$$

$$IP_{spm} = (70,71 \times 20\%) + (100 \times 80\%)$$

$$IP_{spm} = (14,14) + (80,00) = \mathbf{94,14}$$

Berdasarkan perhitungan diatas hasil capaian IPSPM Dinas Sosial Tahun 2023 sebesar **94,14%** dengan kategori **Tuntas Utama**.

Tabel 3.11
Alokasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi
Tahun 2023

NO	Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi	Jumlah Anggaran
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 5.679.141.555
	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.260.500.000
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 6.500.000
	Program Rehabilitas Sosial	Rp. 2.659.448.000
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2.079.300.000
	Program Penanganan Bencana	Rp. 865.000.000
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 100.000.000
b.	APBD Provinsi	<i>0.00</i>
c.	APBN	<i>0.00</i>
d.	Sumber dana lain yang sah	<i>0.00</i>

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Target kinerja merupakan target sasaran yang termuat dalam dokumen rencana strategis dinas. Adapun keberhasilan pencapaian

realisasi target kinerja. Secara umum pencapaian target kinerja mengalami beberapa permasalahan diantaranya :

- Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Sosial masih sangat kurang. Jumlah pegawai yang kami miliki yaitu hanya sekitar 26 orang PNS dan 26 orang NON PNS dirasa sangat kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada bahkan para eselon IV banyak yang tidak memiliki staf dan ada penjabat structural Esselon III & IV yang pensiun.
- Dukungan keaktifan dari pengelola data tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang melakukan updating data dan menginput melalui aplikasi SIKS-NG yang kurang, seringnya berganti operator SIKS NG Desa yang membuat proses updating data terhambat. Jika dari pengelola data tidak aktif maka data usulan tidak akan bertambah karena data bersifat dinamis setiap saat bisa berubah.

Solusi :

- Memanfaatkan potensi SDM yang ada dengan maksimal dan memberikan motivasi kepada mereka untuk bekerja dengan ikhlas.
- Mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran yang ada dengan membuat program kegiatan yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga output yang dihasilkan dapat maksimal dengan jumlah anggaran yang ada.
- Terus melakukan dukungan motivasi kepada operator SIKS NG untuk lebih giat dalam updating data.

3.1.6. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan program kegiatan pembangunan untuk menunjang

pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan merupakan kegiatan untuk menunjang capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kerja. Berikut disajikan tabel analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja.

Tabel 3.12
Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Kegiatan	% Dukungan Capaian Kegiatan
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	%	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0.91 %
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	39.53 %
2	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani.	%	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	30.00 %
3	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial	%	Program hRehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	74.69 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Kegiatan	% Dukungan Capaian Kegiatan
1	2	3	4	5	6	
					Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	2.74 %
4	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	0.01 %
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	91.68 %
5	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	%	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	35.28 %
6	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang	%	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	20.11 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Kegiatan	% Dukungan Capaian Kegiatan
1	2	3	4	5	6	
	(PPKS/PMKS)	mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana				
7	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola	%	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %

Rincian capaian kinerja masing-masing kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target indikator “Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial” tahun 2023 sebanyak 18,91% (471 orang) terealisasi sebanyak 7,90% (461 orang) dari populasi PMKS yang harus mendapatkan pemberdayaan sebanyak 5834 orang Program Pemberdayaan Sosial yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

- a) Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT); dengan pagu anggaran murni sebesar Rp65.000.000,- sesudah perubahan sebesar Rp65.000.000,- terealisasi sebanyak 64.240.000,- berkontribusi terhadap capaian 100% atau 35 orang Keluaran kegiatan adalah sebagai berikut :
 - Jumlah warga komunitas Adat yang mendapatkan Fasilitas pemberdayaan sosial 10 Orang
 - Jumlah Warga Komunitas Adat yang meningkat kapasitasnya 25 Orang
- b) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran murni sebesar Rp1.095.500.000,- sesudah perubahan sebesar Rp1.195.500.000,- terealisasi sebanyak Rp1.179.179.000,- berkontribusi terhadap

pencapaian program sebesar 100% atau 426 orang/Lembag/Sertifikat. Keluaran kegiatan adalah sebagai berikut :

- Jumlah orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten 100 orang
- Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kemampuannya 47 Orang
- Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang meningkatkan Kemampuannya 68 orang
- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenanga Kabupaten/Kota 181 Lembaga
- Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Sertifikat

2. Target indikator “*Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani..*” tahun 2023 sebanyak 15,67% (15 orang) terealisasi sebanyak 0,63% (2 orang) dari populasi PMKS yang harus mendapatkan rehabilitasi sosial sebanyak 319 orang melalui Program Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

- a). Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran murni sebesar Rp6.500.000,- sesudah perubahan sebesar Rp6.500.000,- terealisasi sebanyak Rp975.000,- Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 13.33% atau 2 orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut
- Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang

3. Target indikator “*Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial*” tahun 2023 sebanyak 18,29% (5.562 orang) terealisasi sebanyak 13,99% (5.497 orang) dari populasi PMKS yang harus mendapatkan

rehabilitasi sosial sebanyak 39.284 orang melalui Program Program Rehabilitasi Sosial, yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

a) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti, dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp2.122.000.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp2.631.589.250,- terealisasi sebanyak 2.526.690.694,- Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 93.91% atau 5.012 orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 1181 Orang
- Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 185 Orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 173 Orang
- Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Orang
- Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Sosial Kewenangan Spiritual Dan Penjilidan Dokumen 3200 Orang
- Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 118 Orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 27 Orang
- Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 17 Orang

b) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial; dengan pagu anggaran murni sebesar Rp98.500.000,- sesudah perubahan sebesar Rp98.500.000,- terealisasi sebanyak Rp93.005.000,- Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 100% atau 183 orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 36 Orang
- jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 34 Orang
- Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 22 Orang
- Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 23 Orang

4. Target Indikator "*Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial*" tahun 2023 sebanyak 16,81% (76 Orang dan 577.859 Data) terealisasi sebanyak 15,41% (76 Orang dan 577.859 Data) populasi PMKS yang harus mendapatkan rehabilitasi sosial sebanyak 3.750.513 orang melalui Program Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

a) . Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; dengan pagu murni anggaran sebesar Rp18.000.000,- sesudah perubahan sebesar Rp18.000.000,- terealisasi sebanyak Rp16.700.000,- Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 100 % atau 76 orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Jumlah Jumlah penjangkauan anak terlantar 34 Orang

- Jumlah penjangkauan anak terlantar 12 Orang
 - Jumlah pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar yang dilaksanakan 30 Orang
- b). Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp1.961.300.000,- sesudah perubahan sebesar Rp2.061.300.000,- terealisasi sebanyak Rp2.051.20.7000,- Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 100 % atau 557.859 orang/KPM. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:
- Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 10.000 Data
 - Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 237.442 Data
 - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 330.417 KPM
5. Target Indikator “Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten” tahun 2023 sebanyak 100% (2480 Paket/Orang/HOK) terealisasi sebanyak 100% (2480 Paket/Orang/HOK) dari populasi PMKS yang harus mendapatkan rehabilitasi sosial sebanyak 3.750.513 orang melalui Program Pemberdayaan Sosial, yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:
- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota; dengan pagu murni anggaran sebesar Rp317.000.000,- sesudah perubahan sebesar Rp317.000.000,- terealisasi sebanyak Rp309.389.000,- Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 100 % atau 2.513 orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:
- Jumlah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 2205 Paket
 - Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat

(Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 220 Paket

- Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 88 Paket

6. Target Indikator “Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana” tahun 2023 sebanyak 16.68% (365 Kampung/Orang/Bulan) terealisasi sebanyak 3,35% (365 Kampung/Orang/Bulan) dari populasi PMKS yang harus mendapatkan rehabilitasi sosial sebanyak 10.881 orang melalui Program Program Penanganan Bencana, yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

a. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota; dengan pagu murni anggaran sebesar Rp368.000.000,- sesudah perubahan sebesar Rp548.000.000,- terealisasi sebanyak Rp309.389.000,- Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 100 % atau 365 orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 230 Orang yang terdiri dari 2 Kampung
- Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 135 Orang/Bulan

7. Target Indikator “Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola” tahun 2023 sebanyak 100% (1 Makam) terealisasi sebanyak 1% (1 Makam) dari populasi PMKS yang harus mendapatkan rehabilitasi sosial sebanyak 1 orang melalui Program Program Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

- a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota; dengan pagu murni anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- sesudah perubahan sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebanyak Rp. 98.284.000,- Kegiatan ini tercapai dengan berkontribusi terhadap pencapaian program sebesar 100 % atau 1 orang. Keluaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:
- Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Orang/Triwulan

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran per- indikator kinerja dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial	1.260.500.000	1.243.419.000	98,64
2	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani.	6.500.000	975.000	15,00
3	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial	2.659.448.000	2.619.695.694	98,51

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)				
4	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial	2.079.300.000	2.067.907.000	99,45
5	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	317.000.000	309.389.000	97,60
6	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana	548.000.000	543.165.920	99,12
7	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS)	Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100.000.000	98.284.000	98,28

1. Indikator "*Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial*" mendapatkan anggaran murni sebesar Rp. 1.160.500.000 setelah perubahan sebesar Rp. 1.260.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.243.419.000,- atau 98.64%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Sosial dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
2. Indikator "*Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani..*" mendapatkan anggaran sebesar Rp. 6.500.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 6.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 975.000,- atau 15.00%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
3. Indikator "*Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial*" mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.220.500.000- setelah perubahan sebesar Rp. 2.659.448.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.619.695.694,- atau 98.51%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
4. Indikator "*Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial*" mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.979.300.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 6.042.797.250,- dan" terealisasi sebesar Rp. 2.067.907.000,- atau 99.45%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
5. Indikator "*Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten*" mendapatkan anggaran sebesar Rp. 317.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 317.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 309.389.000,- atau 97.60%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penanganan Bencana dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

6. Indikator "*Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana*" mendapatkan anggaran sebesar Rp. 368.000.000- setelah perubahan sebesar Rp. 548.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 543.165.920,- atau 99.12%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penanganan Bencana dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.
7. Indikator "*Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola*" mendapatkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.284.000,- atau 98.28%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penanganan Bencana dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Jika dilihat dari persentase realisasi penyerapan anggaran, dapat diurutkan dari program pembangunan dengan angka penyerapan paling tinggi adalah sebagai berikut :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan angka persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial realisasi Anggaran sebesar 99,45%. Program ini mendukung Capaian sasaran sebanyak 108,33 % (577.935 orang dan Data)
2. Program Penanganan Bencana dengan angka persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana realisasi Anggaran sebesar 99.12%. Program Tercapainya Capaian sasaran sebanyak 20,08% (365 Kampung/Bulan/Orang)
3. Program Pemerdayaan Sosial dengan angka persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapat pemberdayaan Sosial realisasi Anggaran sebesar 98,64%. Program ini mendukung Capaian sasaran sebanyak 41,78% (461 orang)
4. Program Rehabilitasi Sosial dengan angka persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial realisasi Anggaran sebesar 98,51%. Program ini mendukung Capaian sasaran sebanyak 76,49% (5.497 orang)

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dengan angka presentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola realisasi Anggaran sebesar 98,28%. Program ini Tercapainya sasaran sebanyak 100% (1 orang)
6. Program Penanganan Bencana dengan angka presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten realisasi Anggaran sebesar 97,60%. Program Tercapainya Capaian sasaran sebanyak 100% (2.480 Paket)
7. Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan dengan angka persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani. realisasi Anggaran sebesar 15,00%. Program ini mendukung Capaian sasaran sebanyak 15,00% (5 orang) Secara umum pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran untuk Program yang ada di Dinas Sosial sudah baik, dengan memberikan kontribusi yang positif terhadap terhadap target RENSTRA tahun berjalan ataupun target jangka menengah daerah.

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

Secara umum simpulan dari pencapaian target kinerja tahun 2023 terhadap indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi 2023 tidak dapat terpenuhi sesuai dengan harapan. Sasaran strategis Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan (PPKS/PMKS) memiliki tujuh indikator kinerja yang menunjang terhadap capaian indikator kinerja utama daerah. Capaian realisasi kinerja ke tujuh indikator menunjukkan angka capaian rata-rata 62.01%.

Indikator “Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial (PSKS) dan warga KA yang mendapatkan pemberdayaan Sosial” mendapatkan anggaran murni sebesar Rp. 1.160.500.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 1.260.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.243.419.000,- atau 98.65%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Sosial dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Indikator “Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani..” mendapatkan anggaran sebesar Rp. 6.500.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 6.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 975.000,- atau 15.00%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Indikator “Persentase (%) PPKS yang terlayani dan berfungsi sosial” mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.220.500.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 2.659.448.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.619.695.694,- atau 98.51%. Indikator ini dilaksanakan melalui

Program Rehabilitasi Sosial dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Indikator “Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang terverifikasi dan tervalidasi untuk mendapatkan Akses Layanan Jaminan Sosial” mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.979300.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 2.079.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.067.907.000,- atau 99.45%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Indikator “Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten” mendapatkan anggaran sebesar Rp. 317.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 317.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 309.389.000,- atau 97.60%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penanganan Bencana dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Indikator “Persentase Relawan (Tagana) dan masyarakat rawan bencana yang mendapat pemberdayaan dan kesiapsiagaan bencana” mendapatkan anggaran sebesar Rp. 368.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 548.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 543.165.920,- atau 99.12%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penanganan Bencana dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

Indikator “Persentase (%) Taman Makam Pahlawan yang dikelola” mendapatkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.284.000,- atau 98.28%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penanganan Bencana dari total belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi.

4.2 Saran

Segala dukungan dan bantuan dari semua pihak tentu kami butuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan demi pembangunan Kabupaten Sukabumi. Namun ada beberapa yang menjadi harapan bagi kami di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi demi terselenggaranya kesejahteraan sosial di Kabupaten Sukabumi, diantaranya :

- a) Prioritas sumberdaya manusia sosial untuk menunjang kinerja dan tata kelola pemerintahan di bidang sosial;
- b) Sarana dan prasarana layanan bidang sosial untuk menunjang layanan standar pelayanan minimal daerah di Kabupaten Sukabumi;
- c) Sarana dan prasarana pengelolaan data untuk menunjang layanan rekomendasi semua program perlindungan dan jaminan sosial baik untuk pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi;
- d) Prioritas anggaran untuk melaksanakan program Pembangunan

Sukabumi 30 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Sukabumi



WAWAN CODAWAN SAPUTRA, S.I.P., M.A.P

Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 196807201990061001